

PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MAJENE

Saddam Husain Tamrin¹⁾, Muhammad Sajidin²⁾, Fajar Rakasiwi³⁾, Nurdiyah⁴⁾

^{1,3,4)} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat
muh.sajidin@unsulbar.ac.id

Abstract

Village governments are the spearhead in the implementation of development at the local level, but many of them still face limited capacity in planning adaptive and sustainable development planning. This community service activity aims to strengthen the capacity of village apparatus in Majene Regency through increasing understanding and technical skills in village development planning. This service is in partnership with the Village Community Empowerment Office (DPMD) of Majene Regency, by involving lecturers and students of open universities and the University of West Sulawesi. The methods used include participatory training, workshops, focus group discussions (FGDs), and direct assistance in the preparation of village planning documents. This activity focuses on the principles of integration, community participation, and the use of data in the planning process. The results of the activity showed a significant increase in the understanding of village officials on the concept of adaptive and sustainable development as well as their technical ability to prepare RKPDes documents in a more adaptive manner to social and environmental dynamics. This service proves the importance of collaboration between universities and local governments in strengthening village governance. In conclusion, strengthening village planning capacity is the key to encouraging inclusive, adaptive, and sustainable village development.

Keywords: Capacity Building, Village Government, Village Development Planning, Adaptive and Sustainable.

Abstrak

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal, namun masih banyak di antaranya yang menghadapi keterbatasan kapasitas dalam merencanakan perencanaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa di Kabupaten Majene melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis dalam perencanaan pembangunan desa. Pengabdian ini bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Majene, dengan melibatkan dosen dan mahasiswa universitas terbuka dan Universitas Sulawesi Barat. Metode yang digunakan meliputi pelatihan partisipatif, lokakarya, diskusi kelompok terarah (FGD), serta pendampingan langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan desa. Kegiatan ini berfokus pada prinsip integrasi, partisipasi masyarakat, dan penggunaan data dalam proses perencanaan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman aparatur desa terhadap konsep pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan serta kemampuan teknis mereka dalam menyusun dokumen RKPDes secara lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan. Pengabdian ini membuktikan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola desa. Kesimpulannya, penguatan kapasitas perencanaan desa merupakan kunci dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Keywords: Penguatan Kapasitas, Pemerintah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Adaptif dan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, penguatan kapasitas pemerintahan desa menjadi isu penting, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk merancang dan mengelola pembangunan (Negeri., 2020). Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak aparatur pemerintah desa masih menghadapi keterbatasan dalam hal pemahaman teknis, strategi perencanaan, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan (Suharko, 2016).

Kondisi ini juga tercermin di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majene tahun 2023, dari 62 desa yang tersebar di delapan kecamatan, lebih dari 60% desa belum mampu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) secara partisipatif dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar desa masih terfokus pada aspek administratif dan belum mengintegrasikan isu-isu kelaparan seperti mitigasi risiko bencana, perubahan iklim, atau ketahanan sosial (Desa, 2023).

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah pemerintah desa, terutama kepala desa, dan sekretaris desa sebagai ketua tim penyusun RPJMDes dan

RKPDesa yang dipilih dari 4 kecamatan yaitu kecamatan banggae, kecamatan banggae timur, kecamatan pamboang dan kecamatan sendana dengan berdasarkan pada kriteria rendahnya kapasitas perencanaan, ketergantungan pada energi pendamping desa, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan. Selain itu desa desa tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik, seperti pertanian, perikanan, dan potensi wisata lokal, namun belum dikelola secara optimal dalam kerangka perencanaan jangka menengah.

Secara fisik, wilayah ini memiliki topografi perbukitan dan pesisir yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam pengelolaan lingkungan dan ketahanan bencana. Dari aspek sosial, sebagian besar masyarakat desa di majene menggantungkan hidup pada sektor informal, dengan tingkat pendidikan dan literasi digital aparatur desa yang masih rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS Majene (2022), di mana hanya 25% aparat desa yang memiliki pelatihan perencanaan pembangunan dalam lima tahun terakhir (Majene., 2022).

Permasalahan utama yang menjadi dasar kegiatan ini dilaksanakan adalah kurang dan rendahnya kapasitas pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang adaptif dan berkelanjutan, baik dari aspek teknis, partisipatif, maupun integrasi dengan strategi isu-isu seperti perubahan iklim dan potensi lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas teknis aparatur desa dalam menyusun

perencanaan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan. Mendorong integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan desa. Memfasilitasi proses pendampingan langsung dalam perencanaan yang berbasis potensi dan kebutuhan nyata masyarakat desa (Gunawan, 2017).

Kajian literatur menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang efektif harus didasarkan pada partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan (Fung, 2018). Selain itu reformasi kelembagaan di tingkat lokal membutuhkan pendampingan yang terarah agar tidak terjebak dalam birokratisasi tanpa transformasi (Hadiz, 2017). Pentingnya pembangunan desa yang adaptif terhadap dinamika lokal dan perubahan lingkungan global (Suharko, 2016). Sementara itu, dalam konteks perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa integrasi ekologi sosial dalam perencanaan desa dapat meningkatkan ketahanan komunitas terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (Nugroho & Arifin, 2020).

Upaya serupa telah dilakukan oleh berbagai institusi, seperti program P3MD dan Kementerian Desa, yang fokus pada pendampingan penyusunan RKPDes. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencakup aspek adaptif dan keinginan secara utuh. Oleh karena itu, kegiatan ini berusaha menutup celah tersebut melalui model pendampingan yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan pendekatan partisipatif kontekstual.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif, yaitu pendekatan yang

menempatkan pemerintah desa sebagai subjek utama sekaligus mitra dalam setiap tahapan kegiatan. Metode ini dipilih untuk memastikan proses penguatan kapasitas pemerintah desa berjalan secara inklusif, adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan utama yaitu identifikasi awal, pelatihan, diskusi kelompok terarah (FGD), serta pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan desa.

Tahap pertama dimulai dengan identifikasi dan pemetaan kebutuhan desa, dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majene dan hasil observasi langsung ke lapangan. Survei awal dilakukan untuk memotret tingkat pemahaman awal aparat desa tentang perencanaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan. Survei ini dilengkapi dengan instrumen kuesioner dan wawancara semi-terstruktur.

Tahap kedua adalah pelaksanaan pelatihan dan lokakarya teknis yang fokus pada penguatan pengetahuan dan keterampilan perencanaan desa. Materi pelatihan meliputi pemahaman regulasi perencanaan pembangunan desa, Sinkronisasi arah dan Kebijakan Perencanaan Pemerintah Daerah dan Desa dan Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Yang Adaptif dan Berkelanjutan. Selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan pemerintah desa dan DPMD sebagai forum untuk menggali isu-isu prioritas yang relevan dengan potensi dan tantangan lokal dan evaluasi terkait perencanaan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tahap terakhir adalah pendampingan teknis langsung oleh tim pengabdian, yang dilakukan secara intensif ke beberapa desa.

Pendampingan dilakukan dalam bentuk asistensi penyusunan rancangan RKPDes Tahun 2026, termasuk integrasi data hasil musyawarah, analisis potensi, serta program strategi pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan yang Adaptif dan Berkelanjutan* telah dilaksanakan di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tanggal 16 Mei 2025. Tahapan kegiatan meliputi: (1) koordinasi awal dan identifikasi desa sasaran, (2) pelaksanaan pre-test, (3) pelatihan dan lokakarya teknis, (4) FGD partisipatif, dan (5) pendampingan penyusunan dokumen RKPDes.

Pada sesi pembukaan, Ketua Tim PKM Universitas Terbuka, Saddam Tamrin, S.Sos.,M.A.P, menyampaikan berbagai arahan mengenai pentingnya sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam membangun kapasitas pemerintah desa. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata hilirisasi hasil penelitian dan komitmen perguruan tinggi untuk menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal. Lebih lanjut, Ketua Tim PKM menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus berbasis data, partisipatif, dan mampu merespons dinamika sosial serta perubahan lingkungan secara adaptif. Ia juga menekankan pentingnya membangun semangat kolaboratif dan kesadaran kolektif bahwa pembangunan desa adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi.



Gambar 1 : Foto Kegiatan Pembukaan Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa oleh Kepala DPMD Kabupaten Majene

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majene, Bapak H. Sudirman, S.Pd.,M.Si, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Universitas Terbuka dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa salah satu tantangan besar dalam tata kelola desa saat ini adalah masih rendahnya kapasitas teknis aparatur desa dalam menyusun dokumen perencanaan yang baik dan sesuai regulasi. Ia juga mengungkapkan bahwa masih banyak desa yang menyusun RKPDes secara terburu-buru, tanpa melibatkan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kegiatan ini dinilai sangat relevan dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan desa di Kabupaten Majene. Dalam arahannya, Kepala DPMD juga mendorong agar pemerintah desa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusun rencana pembangunan yang tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga realistis dan menjawab kebutuhan riil masyarakat desa.

Kegiatan penguatan dimulai dari penyampaian materi oleh H. M. Rusbi Hamid, S.Sos M.Si terkait sinkronisasi arah dan perencanaan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, dalam paparannya disampaikan bahwa sinkromerupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan yang

harmonis, efektif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Majene, sinkronisasi ini menjadi semakin penting mengingat dinamika pembangunan daerah yang mengancam keterbatasan sumber daya, disparitas wilayah, dan kebutuhan mendesak terhadap tata kelola yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Majene melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah mencanangkan visi “Majene Unggul, Mandiri, dan Religius” atau di singkat UMR. Dalam dokumen ini, salah satu fokus utama pembangunan adalah penguatan kapasitas pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan potensi lokal yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, arah kebijakan ini menuntut keselarasan dengan perencanaan di tingkat desa, terutama dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Namun, dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan kesenjangan antara prioritas pembangunan daerah dan rencana pembangunan desa, yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi, kapasitas teknis, serta minimnya pemahaman terhadap mekanisme perencanaan yang integratif.

Melalui kegiatan pengabdian ini, salah satu upaya strategi yang dilakukan adalah mendorong desa untuk mengadopsi pendekatan perencanaan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten. Sinkronisasi tersebut difasilitasi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada aparatur desa, termasuk pemahaman terhadap dokumen RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan regulasi sektoral

lainnya. Selain itu, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) juga diarahkan untuk menjembatani komunikasi antara perangkat desa dan perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, agar perencanaan yang dihasilkan mampu terintegrasi secara vertikal.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Narasumber terkait sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Daerah dan Desa

Salah satu pencapaian penting dalam proses ini adalah dengan adanya dokumen RPJMDes hasil pendampingan yang telah memasukkan program-program prioritas daerah seperti penanggulangan stunting, penguatan ekonomi lokal berbasis desa wisata, dan peningkatan kualitas layanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi bukan hanya soal keselarasan dokumen, tetapi lebih jauh komitmen bersama dalam menyelaraskan visi pembangunan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sinkronisasi perencanaan juga memiliki pengaruh pada efektivitas penganggaran, di mana program-program desa yang sejalan dengan prioritas kabupaten berpeluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan pembiayaan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, maupun program lintas sektor. Oleh

karena itu, peningkatan kapasitas desa dalam menyusun perencanaan yang sinkron tidak hanya memperkuat posisi desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tetapi juga meningkatkan peluang desa untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Selanjutnya pemaparan materi yang kedua dari Bapak Zulkarnain Hasanuddin, SE.,MM terkait strategi perencanaan pembangunan desa yang adaptif dan berkelanjutan dimana dalam konteks perencanaan di desa melalui pendekatan yang menekan pada kemampuan desa dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara dinamis, serta memastikan pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Strategi ini menjadi penting mengingat desa sebagai entitas pemerintahan yang terdepan dalam tantangan kompleks seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, migrasi penduduk, dan degradasi lingkungan, yang semuanya memerlukan pendekatan perencanaan yang tidak kaku, tetapi fleksibel dan antisipatif.

Strategi utama dalam mewujudkan perencanaan adaptif adalah memperkuat kapasitas analitis dan kelembagaan desa. Hal ini meliputi penguasaan aparatur desa terhadap data dasar pembangunan, kemampuan melakukan pemetaan potensi dan masalah secara partisipatif, serta pemahaman terhadap instrumen regulasi seperti RPJMDes, RKPDes, dan SDGs Desa. Pendekatan ini juga menuntut perencanaan berbasis data base atau hasil pemetaan, di mana keputusan pembangunan harus didukung oleh data dan kajian lapangan yang komprehensif.

Selanjutnya, strategi berkelanjutan dalam pembangunan desa menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya lokal secara lestari,

perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, desa perlu merancang program-program pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian alam dan kesejahteraan generasi mendatang. Misalnya, program pengembangan pertanian organik, konservasi mata air, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan revitalisasi kearifan lokal merupakan bagian dari strategi keberlanjutan yang dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan.

Aspek partisipatif menjadi pilar penting dalam strategi perencanaan adaptif dan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan musyawarah dusun hingga forum desa akan memastikan bahwa rencana pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Proses ini juga memberikan ruang bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas untuk terlibat secara setara, sesuai dengan prinsip inklusivitas dalam pembangunan berkelanjutan.

Terakhir, strategi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi dengan kebijakan daerah dan nasional, seperti RPJMD kabupaten/kota, SDGs nasional, dan kebijakan kementerian terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan desa berada pada jalur strategi yang sama, sehingga membuka peluang dukungan keuangan lintas sektor dan memperkuat koordinasi antartingkat pemerintahan. Dengan demikian, perencanaan strategi yang adaptif dan berkelanjutan tidak hanya menjawab tantangan internal desa, tetapi juga memperkuat posisi desa

sebagai aktor pembangunan yang strategis di tingkat lokal maupun nasional.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kapasitas aparatur desa. Berdasarkan analisis data pre-test dan post-test, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 42% dalam pemahaman aparatur desa mengenai perencanaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan. Sebelum pelatihan, hanya 3 dari 25 peserta yang mampu menjelaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mekanisme penyusunan RPJMDes berbasis data. Selesai pelatihan, 21 peserta menunjukkan pemahaman yang baik hingga sangat baik dalam menyusun rencana pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Adapun yang menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan ini didasarkan pada adanya peningkatan pengetahuan yang diukur berdasarkan pre-post test, selain itu keterlibatan aktif peserta dalam pelatihan dan Evaluasi kualitas dokumen RKPDes hasil pendampingan dilihat dari kesetaraan dan integrasi prinsip keingintahuan dan umpan balik dari kepala desa dan DPMD, yang menyatakan bahwa metode pelatihan dan pendampingan lebih aplikatif dibandingkan kegiatan sebelumnya.



Gambar 3. Foto bersama peserta setelah mengikuti pelatihan penguatan kapasitas pemerintah desa di Kabupaten Majene

Hasil ini memperkuat temuan yang menekankan pentingnya kapasitas lokal dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan inklusif (Sari, 2022). Selain itu, pendekatan penguatan kelembagaan pelatihan melalui dan pendampingan teknis sebagaimana dilakukan dalam kegiatan ini juga sejalan dengan konsep *pengembangan kapasitas* yang diusulkan oleh UNDP, yaitu proses berkelanjutan dalam membangun kemampuan lokal untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Amin, 2023).

Secara umum, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis perangkat desa dalam menyusun rencana pembangunan, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap pentingnya inklusi sosial, niat buruk lingkungan, dan pengelolaan sumber daya lokal secara strategis. Model pelibatan masyarakat yang digunakan dalam kegiatan ini dapat direplikasi di desa lain, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial dan kelembagaan yang serupa.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kemitraan antara Universitas Terbuka dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene menunjukkan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat kapasitas aparatur desa. Permasalahan rendahnya kualitas perencanaan pembangunan di tingkat desa baik dari sisi teknis, partisipatif, maupun sinkronisasi dengan kebijakan daerah dapat diintervensi secara efektif melalui pendekatan pendidikan masyarakat yang kontekstual dan aplikatif.

Melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan forum

diskusi terstruktur, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan. Sasaran desa-desa mulai mampu menyusun dokumen perencanaan yang berbasis data, inklusif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Keterlibatan aktif perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lokal menjadi modal sosial penting untuk menjaga program kesinambungan ini ke depan.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini memperkuat argumen bahwa perencanaan pembangunan desa yang berkualitas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia, keinginan proses pembelajaran, dan dukungan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, upaya serupa perlu direplikasi secara luas sebagai strategi hilirisasi hasil penelitian dan kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan nasional berbasis desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka atas dukungan atas dukungan pendanaan dan fasilitas kegiatan ini melalui skema Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majene, serta para kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di wilayah sasaran yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas aparatur desa

dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta menjadi kontribusi nyata Universitas Terbuka dalam mendukung pembangunan desa dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. (2023). Dinamika Sosial dan Perubahan Iklim: Implikasi bagi Pembangunan Desa. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 67-75.
- Desa, P. (2023). *Laporan Tahunan Kegiatan Pendampingan Desa*. Majene: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene.
- Fung, A. &. (2018). *Memperdalam Demokrasi: Inovasi Kelembagaan dalam Tata Kelola Partisipatif yang Berdaya*. London: Verso Books.
- Gunawan, A. (2017). *Pengelolaan Desa Wisata Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadiz, V. &. (2017). *Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia: Politik Oligarki di Era Pasar*. New York: Routledge .
- Majene., B. P. (2022). *Statistik Daerah Kabupaten Majene 2022* . Majene: BPS.
- Negeri., K. D. (2020). *Panduan Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Nugroho, H., & Arifin, A. W. (2020). Nugroho, H., Wibowo, A., & Arifin, M. (2020). Ketahanan Sosial-Ekologis dalam Perencanaan Desa: Sebuah Kasus di Indonesia. *Jurnal Studi Pembangunan Pedesaan*, 45–59.
- Sari, N. (2022). *Perencanaan Pembangunan Desa*:

Pemahaman dan Implementasi.
Jurnal Administrasi Publik, 21-35.

Suharko. (2016). Pembangunan Desa dan Penguatan Kelembagaan Lokal. *urnal Penelitian Sosial*, 97–114.

Taufik, M. &. (2021). Pembangunan Berbasis Desa: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 45-58